

Lampiran 3. PERATURAN MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010
Tanggal : 27 Juli 2010

PEDOMAN

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2014**

KATA PENGANTAR

Kegiatan SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi serta intervensi di lokasi rawan pangan. Kegiatan SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG.

Penerapan SKPG tetap diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Hal ini diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota bahwa target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai pada tahun 2015 sebesar 60 persen.

Pedoman SKPG yang berlaku saat ini belum perlu dilakukan perubahan, sehingga masih dapat menjadi acuan kegiatan SKPG tahun 2014 bagi petugas di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pedoman SKPG tersebut tetap dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan SKPG. Semoga dengan memanfaatkan Pedoman SKPG upaya mengantisipasi terjadinya rawan pangan dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 8 Januari 2014
Kepala Badan Ketahanan Pangan

Achmad Suryana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Keluaran	2
E. Ruang Lingkup	2
II. PELAKSANAAN	3
A. Data yang Dikumpulkan	3
B. Jenis Formulir	5
C. Pengolahan dan Analisis Data	5
D. Pelaporan dan Evaluasi.....	11
III. PENGORGANISASIAN	13
IV. PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan	3
2. Data, Sumber Data dan Frekuensi Tahunan	4
3. Analisis Ketersediaan Bulanan	5
4. Analisis Akses Pangan Bulanan	5
5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan	6
6. Indikator Komposit Ketersediaan Bulanan	6
7. Indikator Komposit Akses Pangan	7
8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan Bulanan	7
9. Keterangan Warna Komposit Bulanan.....	7
10. Analisis Skor Komposit	7
11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan	9
12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan	9
13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan	10
14. Analisis Komposit Tahunan	10
15. Jadwal Pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi	11

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Form A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan	16
2. Form A2. Akses Pangan Bulanan	19
3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan	20
4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal	21
5. Form A5. Investigasi	22
6. Form B1. Aspek Ketersediaan Tahunan	24
7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan	31
8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Indonesia

Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi seluruh wilayah Indonesia.

Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang usaha pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas dimulai dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di Indonesia pada tahun 1979. Proyek penelitian dan pengembangan SKPG dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan dukungan dari *Cornell University* Amerika Serikat. Dari pilot proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh proses pengembangan Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pilot proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi. Oleh karena itu dalam periode 1990-1997 SKPG dikembangkan dengan lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), (2) Pemantauan Status Gizi, dan (3) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG).

SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban: (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan penanggulangan masalah

pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di wilayah provinsi. Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti: (1) melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten; (2) melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten; (3) melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan; (4) melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

B. Tujuan

Pedoman ini memuat penjelasan teknis pelaksanaan dan penerapan SKPG di tingkat kabupaten. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah di dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi indikator ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu daerah.

C. Sasaran

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan SKPG.

D. Keluaran

1. Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan
2. Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan rawan pangan
3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi
4. Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (*indepth investigation*) bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kabupaten.

BAB II PELAKSANAAN

A. Data yang Dikumpulkan

1. Data Bulanan

Data bulanan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan, dan (4) spesifik lokal

Tabel 1. Data, Sumber Data dan Frekuensi Bulanan

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Luas tanam	Dinas Pertanian	SP Padi SP Palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar)
	b. Luas puso	Dinas Pertanian	Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP)
	c. Luas panen	Dinas Pertanian	
	d. Cadangan Pangan	BKP/BULOG	
B. Akses Terhadap Pangan	Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur)	Dinas Perindag/BKP	Survei Harga
C. Pemanfaatan Pangan	a. Angka Balita Ditimbang (D) b. Angka Balita Naik Berat Badan (N) c. Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) d. Angka Balita dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) e. Kasus gizi buruk yang ditemukan	Dinas Kesehatan	Laporan Penimbangan dan KLB
D. Spesifik Lokal	Jumlah tindak kejahatan, jumlah KK dengan anggota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar	Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas	Apabila Diperlukan

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
	daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, cuaca, dll	Kehutanan, Dinas Kesehatan, BMKG, dll	
E. Data Pendukung	a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir	Dinas Pertanian dan BPS	Digunakan untuk analisis bulanan

Setelah diketahui kantong-kantong kerawanan pangan dari hasil analisis bulanan langkah selanjutnya dilakukan investigasi. Data investigasi dikumpulkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim Pangan dan Gizi. Data yang dikumpulkan antara lain: (1) kondisi umum responden, (2) Permasalahan yang dihadapi oleh responden, (3) pemecahan masalah yang telah dilakukan.

2. Data Tahunan

Data tahunan dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, dan (3) pemanfaatan pangan

Tabel 2. Data, Sumber Data, dan Frekuensi Tahunan

Kelompok	Data	Sumber Data	Keterangan
A. Ketersediaan Pangan	a. Produksi setara beras b. Jumlah penduduk tengah tahunan c. Cadangan pangan	Dinas Pertanian BPS BPS BKP/BULOG	ATAP yang keluar pada bulan Juli tahun berjalan dan menggunakan data ARAM II tahun berjalan Data proyeksi penduduk tengah tahun
B. Akses Terhadap Pangan	a. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I b. Harga c. IPM d. NTP	SKPD KB Kab/Kota BPS/Dinas Perindag BPS BPS	- time series data
C. Pemanfaatan Pangan	a. Jumlah balita b. Persen Balita gizi buruk (-3 SD) c. Persen Balita gizi kurang (-2 SD)	Dinas Kesehatan (hasil Pemantauan Status Gizi)	Berat Badan/Umur Berat Badan/Tinggi

B. Jenis Formulir

Jenis formulir yang digunakan dalam pengumpulan data:

Formulir A1. Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan (Lampiran 1)

Formulir A2. Aspek Akses Pangan Bulanan (Lampiran 2)

Formulir A3. Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan (Lampiran 3)

Formulir A4. Aspek Indikator Spesifik Lokal (Lampiran 4)

Formulir A5. Investigasi Rumahtangga (Lampiran 5)

Formulir B1. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan (Lampiran 6)

Formulir B2. Aspek Akses Pangan Tahunan (Lampiran 7)

Formulir B3. Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan (Lampiran 8).

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan

a. Ketersediaan Pangan

Tabel 3. Analisis Ketersediaan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r \geq 5$	1 = Aman
		$-5 \leq r < 5$	2 = Waspada
		$-r < -5$	3 = Rawan
2	Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	$r < -5$	1 = Aman
		$5 \leq r < -5$	2 = Waspada
		$r > 5$	3 = Rawan

Dalam rangka memperkuat analisis ketersediaan bulanan juga dilakukan analisis deskriptif pada data-data pendukung yaitu luas panen dan cadangan pangan yang ada pada bulan bersangkutan.

b. Akses Pangan

Tabel 4. Analisis Akses Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		$r > 20$	3 = Rawan
2	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
3	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
4	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
5	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas gula dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
6	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas minyak goreng dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
7	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas daging ayam dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan
8	Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas telur dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 15$	2 = Waspada
		> 15	3 = Rawan

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Tabel 5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Bulanan

No	Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot
1	Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang (D)	$r \geq 90$	1 = Aman
		$80 \leq r < 90$	2 = Waspada
		< 80	3 = Rawan
2	Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 5$	1 = Aman
		$5 \leq r \leq 10$	2 = Waspada
		> 10	3 = Rawan
3	Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang (D)	$r < 10$	1 = Aman
		$10 \leq r \leq 20$	2 = Waspada
		> 20	3 = Rawan

d. Komposit

Tabel 6. Indikator Komposit Ketersediaan Pangan

	Persentase rata-rata luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulanan 5 tahun			
Persentase rata-rata luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulanan 5 tahun	Bobot	1	2	3
	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6

Keterangan:

Total bobot 2 = warna hijau

Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning

Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

Tabel 7. Indikator Komposit Akses Pangan

		Indiaktor 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7														
Indikator 8	Bobot	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Keterangan:

Total bobot 8 – 11 = warna hijau

Total bobot 12 – 17 = warna kuning

Total bobot 18 – 24 = warna merah

Tabel 8. Indikator Komposit Pemanfaatan Pangan

		Indikator 1 + 2				
Indikator 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

Tabel 9. Keterangan Warna Komposit Analisis Bulan

Indikator Komposit	Warna	Bobot
Ketersediaan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Akses	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3
Pemanfaatan	Hijau	1
	Kuning	2
	Merah	3

Tabel 10. Analisis Komposit Bulanan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Bobot	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada bobot 3 = warna merah (rawan)

e. Spesifik Lokal

Gejala akan terjadinya rawan pangan dan gizi yang dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Suatu daerah dikatakan aman apabila tidak terjadi perubahan indikator lokal yang berarti jika dibandingkan dengan kondisi normal. Daerah dikatakan waspada apabila terjadi perubahan indikator lokal yang melebihi kondisi normal. Daerah dapat disebut rawan apabila terjadi perubahan indikator yang sangat ekstrim melebihi kondisi normal.

f. Investigasi

Analisis data hasil investigasi dilakukan secara deskriptif dengan melihat permasalahan dan upaya penanganan masalah yang dilakukan dari 3 aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dengan hasil analisis investigasi diharapkan dapat:

- a) Menentukan kelompok sasaran (rumah tangga)
- b) Menentukan jenis intervensi yang akan dilakukan (apa, jumlah, berapa lama)

2. Analisis Situasi Pangan dan Gizi Tahunan

Analisis situasi pangan dan gizi tahunan disajikan berdasarkan tiga jenis indikator: (1) aspek ketersediaan, (2) aspek akses pangan, dan (3) aspek pemanfaatan pangan.

a. Aspek ketersediaan

Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

dimana : F = Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari

P_{food} = Produksi Netto Pangan Sereal

t_{pop} = total populasi

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan sereal per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori

per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal per hari. Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana :

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Sereal.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan sereal, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih sereal (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan sereal di daerah tersebut.

Tabel 11. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Indikator	Nilai (r)	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif	$r > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < r \leq 1,14$	2	Kuning
	$r < 0,90$	3	Merah

b. Aspek Akses Pangan

Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS dan KS-1 alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan KB.

Tabel 12. Analisis Aspek Akses Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
% Pra Sejahtera dan Sejahtera I	$r < 20$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40$	2	Kuning
	≥ 40	3	Merah

Selain itu untuk memperkuat analisis aspek akses juga dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data pendukung seperti data time series harga bulanan, Nilai Tukar Petani, dan Indeks Pembangunan Manusia.

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG).

Tabel 13. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r) (%)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada Balita	$r < 15$	1	Hijau
	$15 \leq r \leq 20$	2	Kuning
	> 20	3	Merah

d. Analisis Komposit

Ketiga indikator digabung (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi wilayah, maka dapat menggunakan tahapan sebagai berikut :

- Menjumlahkan ketiga nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan.
- Jumlah ketiga nilai indikator akan diperoleh maksimum 9, dan jumlah yang terendah 3.

Tabel 14. Analisis Komposit Tahunan

		Komposit 1 + 2				
Komposit 3	Skor	2	3	4	5	6
	1	3	4	5	6	7
	2	4	5	6	7	8
	3	5	6	7	8	9

Keterangan:

Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman)

Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada)

Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

Hasil analisis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan intervensi penanganan. Hasil analisis juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta untuk mempermudah dalam mensosialisasikan dan advokasi pengambilan kebijakan. Peta situasi pangan dan gizi adalah peta yang menggambarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah dan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dengan demikian maka peta situasi pangan dan gizi merupakan gabungan antara tiga peta, yaitu peta ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan peta tersebut adalah hasil analisis dari tiga indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang diuraikan pada hasil analisis sebelumnya. Peta rawan pangan dan gizi sangat berguna bagi pemerintah daerah, untuk :

- a. Mengidentifikasi wilayah - wilayah rawan
- b. Mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi
- c. Memperbaiki kualitas perencanaan dibidang pangan dan gizi.

Selain tujuan di atas, hasil dari pemetaan situasi pangan dan gizi ini dapat digunakan untuk mengamati keterkaitan antar sektor, menajamkan sasaran baik penduduk maupun wilayah itu sendiri, serta kemungkinan faktor penyebab. Selain itu pemetaan ini dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program intervensi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk kepentingan pemetaan kerawanan pangan dan gizi ini, setiap wilayah bisa menyediakan empat lembar peta wilayah (ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan dan komposit situasi pangan dan gizi).

D. Pelaporan dan Evaluasi

1. Pelaporan

- a. Pokja Pangan dan Gizi (PPG) mengelola laporan dari kecamatan dan kemudian menganalisa dan membahas laporan tersebut sehingga tersusun informasi tentang situasi pangan dan gizi wilayahnya setiap bulan secara berkesinambungan.
- b. Pokja menyampaikan informasi/laporan tersebut kepada Bupati atau ketua PPG setiap bulan secara berkesinambungan.
- c. Bilamana terjadi masalah, maka Pokja menyusun alternatif pemecahan masalah sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Bupati/KDH. Tk. II..
- d. Pokja mengkompilasi laporan tingkat kecamatan dan menyampaikan laporan ke Pokja tingkat propinsi dengan tembusan ke "pusat".
- e. Pembahasan situasi pangan dan gizi dilaksanakan oleh Pokja PG yang dikoordinasikan oleh DKP/TPG kabupaten, dan dilakukan secara rutin setiap bulan.

Tabel 15. Jadwal Pelaporan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

Frekuensi Pengumpulan	Jenis Formulir	Waktu Pelaporan (Paling Lambat)
Bulanan	A1, A2, A3, A4	Tanggal 20 bulan berikutnya
Tahunan	B1, B2, B3	Tanggal 31 Juli tahun berjalan

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap tingkat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SKPG. Dari hasil evaluasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran situasi produksi dan ketersediaan pangan, situasi gizi dan kemiskinan

pada setiap wilayah pelaksanaan SKPG di sektor terkait sebagai bahan untuk penyusunan kebijaksanaan/program pembangunan pangan dan gizi.

Evaluasi tiap tingkatan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi tingkat kabupaten dilakukan setiap bulan.
- 2) Evaluasi dilakukan melalui rapat/pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai Ketua DKP.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Kabupaten membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan susunan Pokja/Tim minimal sebagai berikut:

1. Sekretaris: BKP/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat kabupaten
2. Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait, antara lain:
 - Bappeda
 - Unsur Pemda (Sekda, Asisten)
 - Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
 - Dinas Kesehatan
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Kantor Statistik Kabupaten
 - SKPD-KB Kabupaten/Kota
 - Dinas Sosial
 - Bakorluh (Badan koordinasi penyuluhan)
 - Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam
 - Divisi Regional Perum Bulog
 - Kepolisian Resort

Tugas umum pokja SKPG di tingkat kabupaten antara lain:

- a. Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi.
- c. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat kabupaten antara lain:

- a. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).
- b. Melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi.
- d. Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Provinsi.
- e. Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini dijadikan sebagai acuan bagi aparat Pelaksana SKPG di daerah yang terdiri dari Instansi Pemda, BAPPEDA, Badan (Bimas) Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan BKKBN. Pedoman teknis dimaksudkan untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi aparat daerah untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan SKPG pada penanganan kerawanan pangan. Oleh karena itu penjabarannya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Keberhasilan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan dalam pelaksanaannya, sangat tergantung adanya: koordinasi antar instansi terkait, dukungan dari Pemerintah Daerah, dan komitmen Tim Pokja untuk melakukan aktivitas kegiatan SKPG secara rutin berkelanjutan.

Keberhasilan dalam melakukan Advokasi program SKPG kepada Pemerintah Daerah sangat penting untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan SKPG. Oleh karena itu Indikator untuk mewaspadaai masalah timbulnya kerawanan pangan dan gizi, baik indikator dari sektor pertanian, indikator sektor kesehatan dan BKKBN maupun Sektor terkait lainnya perlu dipahami dengan baik dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana petugas SKPG dilakukan melalui kegiatan pelatihan (TOT), *capacity building* (pemberdayaan petugas dan masyarakat), dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas SKPG dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis untuk merencanakan program dan melakukan intervensi daerah rawan pangan gizi.

Demikian Pedoman Pengelolaan SKPG tingkat kabupaten ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman petugas dalam upaya mengatasi kerawanan pangan dan gizi.

**MENTERI PERTANIAN RI/
KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,**

SUSWONO

LAMPIRAN

Lampiran 1a. Form A11 Aspek Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan :

Tahun :

No	Kecamatan	Luas Tanam	Rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	Luas Puso	Rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir	Luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir		Luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir		Komposit
		(Ha)	(Ha)	(Ha)		(%)	Bobot	(%)	Bobot	
1	2	3	4	5	6	$7 = ((3/4) \times 100) - 100$	8	$9 = ((6/7) \times 100) - 100$	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
	Jumlah									

Ket: Kolom 7

$r \geq 5$

$-5 \leq r < 5$

$-r < -5$

1 = Aman

2 = Waspada

3 = Rawan

Kolom 9

$r < -5$

$5 \leq r < -5$

$r < 5$

1 = Aman

2 = Waspada

3 = Rawan

Kolom 11

Total bobot 2 = warna hijau

Total bobot 3 – 4 dan tidak ada bobot 3 = warna kuning

Total bobot 4 – 6 dan ada bobot 3 = warna merah

....., 2014

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 1b. Form A12 Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan :

No	Kecamatan	Luas Panen			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2014

Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 1c. Form A13 Ketersediaan Pangan Bulanan

Kabupaten :

Bulan :

No	Kecamatan	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2014

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 2. Form A2. Akses Pangan Bulanan

Kecamatan :

Bulan : Tahun :

No.	Komoditi	Harga Rata-rata Bulan Berjalan di Tingkat Konsumen (Rp/Kg)	Harga Rata-rata 3 bulan Terakhir (Rp/Kg)	Persentase Harga Rata-rata Bulan Berjalan Dibandingkan Harga Rata-rata 3 bulan (%)	Bobot
1	2	3	4	$5 = ((3/4) \times 100) - 100$	6
1	Beras				
2	Jagung				
3	Ubi Kayu				
4	Ubi Jalar				
5	Gula				
6	Minyak Goreng				
7	Daging				
8	Telur				

Keterangan : Kolom 6

Komoditi Beras

Komoditi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, Minyak Goreng, Daging, dan Telur

Sekretariat Pokja

Persentase Bobot

$r < 5$ 1 = Aman
 $5 \leq r \leq 20$ 2 = Waspada
 $r > 20$ 3 = Rawan

Persentase

$r < 5$
 $5 \leq r \leq 15$
 > 15

Bobot

1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

Petugas

.....

Lampiran 3. Form A3. Aspek Pemanfaatan Pangan

Kabupaten :

Bulan:

Tahun:

No.	KECAMATAN	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DITIMBANG (D)	JUMLAH BALITA BB NAIK (N)	JUMLAH BALITA BGM	BALITA YANG TIDAK NAIK BERAT BADANNYA DALAM 2 KALI PENIMBANGAN BERTURUT-TURUT	PENCAPAIAN		
							N/D (%)	BGM/D (%)	2T/D (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Keterangan:

Kolom 8

Persentase

$r > 90$
 $80 \leq r \leq 90$
 < 80

Kolom 9

Bobot

1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

Kolom 10

$r < 5$
 $5 \leq r \leq 10$
 > 10

1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

$r < 10$
 $10 \leq r \leq 20$
 > 20

1 = Aman
 2 = Waspada
 3 = Rawan

....., 2014

Sekretariat Pokja
 Petugas

Lampiran 4. Form A4. Indikator Spesifik Lokal

Kecamatan

Bulan:

Tahun:

No	Jenis Indikator	Bulan Lalu	Bulan Ini	Kesimpulan			Keterangan (Sumber Informasi)
				Normal	Menurun	Meningkat	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

..... 2014
Sekretariat Pokja
Petugas

.....

Lampiran 5. Form A5. Investigasi

NOMOR KUESIONER:			
A	DATA WILAYAH		
A.1	Provinsi	A.3 Kecamatan	A.5 Desa/Kota
A.2	Kabupaten	A.4 Desa	
A.6	Dusun (RT/RW)		A.7 Tanggal
A.8	Nama Kepala Rumah Tangga		

B	KOMPOSISI RUMAH TANGGA		
B.1	Kepala Rumah Tangga (Laki-laki/Perempuan)		
B.2	Pendidikan Kepala Rumah Tangga (Tidak Sekolah/SD/SMP/SMA/S1/S2/S3)		
B.3	Umur Kepala Rumah Tangga		
B.4	Jumlah Anggota Keluarga (termasuk pembantu)		
B.5	Anak < 5 thn	B.8 Dewasa 18-60 tahun	
B.6	Anak 5-11 thn	B.9 Orang tua > 60 tahun	
B.7	Remaja 12-17 thn		

C	SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA		
C.1	Bertani/berkebun dan menjual hasilnya		
C.2	Beternak hewan/ikan dan menjual hasilnya		
C.3	Menangkap hewan/ikan dan menjual hasilnya		
C.4	Mencari hasil hutan (rotan/cendana/gaharu) dan menjual hasilnya		
C.5	Pengrajin produk lokal dan menjual hasilnya		
C.6	Buruh Pertanian dan menerima upah		
C.7	Buruh Non-Pertanian/Industri dan menerima upah		
C.8	Jasa transportasi kecil (Ojek/Becak/Kereta Kuda)		
C.9	Jasa transportasi besar (Angkot/Bis/Truk)		
C.10	Pedagang Keliling		
C.11	Pedagang Kecil/Kios		
C.12	Pedagang Besar/Agen		
C.13	Jasa penginapan/tempat tinggal/tempat usaha (kost/kontrakan)		
C.14	Pegawai Pemerintah - PNS (termasuk aparat desa yang menerima gaji)		
C.15	Polri / TNI		
C.16	Pegawai swasta dan menerima gaji		
C.17	Pensiunan Swasta/Pemerintah		
C.18	Menerima kiriman uang dari anggota keluarga lainnya		
C.19	Pemulung		
C.20	Bekerja serabutan/tidak tetap		

D KONSUMSI PANGAN		
Berapa kali anggota keluarga berikut ini makan dalam satu hari dalam 7 hari terakhir		
D.1	Anak < 5 tahun	D.2. Ibu Hamil dan Menyusui
		D.3. Anggota Keluarga Lainnya
Berapa hari dalam 7 hari terakhir anggota keluarga mengkonsumsi jenis makanan berikut		
D.4	Karbohidrat (Roti/Biskuit/Nasi/Jagung/Singkong/Ubi Jalar/Mie/Bihun)	7
D.5	Protein Nabati (Tempe/Tahu/Kacang-kacangan)	1?
D.6	Sayur-sayuran	?
D.7	Buah-Buahan	
D.8	Proten Hewan (Daging/Hari/Limpa/Jantung/Telur/Ikan)	
D.9	Produk Susu (Susu/Keju/Yogurt)	
D.10	Produk Gula (Gula/Madu/Selai)	
D.11	Minyak Goreng/Mentega/Margarin	
D.12	Bumbu-bumbu (Cabai/Bawang/Jahe/dll)	

E KESULITAN UMUM		
Jenis Kesulitan Umum yang dihadapi keluarga		
E.1	Masalah Pertanian/Perkebunan/Perikanan (Gagal Panen, Hasil Sedikit, dll)	Ya
E.2	Masalah Produksi (Bahan Baku Sulit, Tenaga Kerja Sedikit, dll)	Tidak
E.3	Turunnya harga jual produk/jasa	?
E.4	Naiknya harga-harga non-pangan	?
E.5	Naiknya Harga Pangan	Ya
E.6	Tingginya Biaya Pendidikan	?
E.7	Tingginya Biaya Pengobatan	
E.8	Tingginya Biaya pembangunan/perbaikan tempat tinggal	
E.9	Tingginya Biaya perayaan/pesta	
E.10	Meningkatnya Kejahatan	
E.11	Kerusakan lingkungan/Kesulitan Air Bersih	
E.12	Kesulitan lainnya Sebutkan	

F PEMECAHAN MASALAH		
Dalam 7 hari terakhir, berapa hari hal dibawah ini dilakukan (0: Tidak pernah; 7: Setiap Hari)		
F.1	Membeli/mengkonsumsi makanan dengan kualitas lebih rendah	
F.2	Mengurangi porsi makan	
F.3	Mengurangi jumlah makan dalam sehari	
F.4	Berhutang atau menumpang makan pada keluarga/tetangga	
F.5	Mengurangi makanan orang dewasa dan mengutamakan anak-anak	

	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Enumerator			
Pemeriksa			
Sekretaris Pokja			

Lampiran 6a. Form B11. Aspek Ketersediaan Tahunan

Kabupaten :
Tahun :

No	Kecamatan	Perkiraan Produksi (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Ket:

- 1 Jumlah Penduduk Tengah Tahun :
- 2 Konsumsi Normatif :

....., 2014
Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 6b. Form B12. Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Kabupaten :

Tahun :

No	Kecamatan	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)			
		Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

....., 2014

Sekretariat Pokja
Petugas

Lampiran 6c. Analisis Aspek Ketersediaan Tahunan

1) Padi

- ❖ Produksi padi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Padi (Pnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Gabah:

$$\text{Benih (s)} = P \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = P \times 0,44\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = P \times 5,4\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) 2006/07.

- ❖ Untuk mendapat produksi netto beras (Rnet), kalikan data netto padi dengan Faktor Konversi (c) di masing-masing kabupaten. Untuk seluruh kabupaten di suatu provinsi maka Faktor Konversi nasional adalah 0,632 (atau 63,2%). Maka, produksi netto beras dihitung sebagai berikut:

$$R_{\text{net}} = c * P_{\text{net}}$$

di mana:

$$P_{\text{net}} = P - (s+f+w)$$

2). Jagung

- ❖ Data produksi dikurangi dengan data Benih (s), Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Jagung (Mnet), nilai konversi untuk benih, pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan Susut Jagung

$$\text{Benih (s)} = M \times 0,9\%$$

$$\text{Pakan ternak (f)} = M \times 6\%$$

$$\text{Tercecer (w)} = M \times 5\%$$

Faktor konversi untuk benih, pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Jagung (Mnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$M_{\text{net}} = M - (s+f+w)$$

3). Umbi-umbian

1. Ubi Kayu

- ❖ Produksi ubi kayu kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan Ubi Kayu (Cnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan ubi kayu Pakan ternak (f)= C x 2% Tercecer (w)= C x 2,13%
--

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Kayu (Cnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$C_{net} = C - (f+w)$

2. Ubi Jalar

- ❖ Produksi ubi jalar Kurangi dengan data Pakan (f) dan Tercecer (w) untuk mendapatkan data netto ketersediaan ubi jalar (SPnet), nilai konversi untuk pakan, dan tercecer masing-masing adalah:

Perhitungan ubi jalar Pakan ternak (f)= SP x 2% Tercecer (w)= SP x 10%

Faktor konversi untuk pakan ternak dan tercecer diambil dari Neraca Bahan Makanan (NBM).

Produksi Netto Ubi Jalar (SPnet) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$SP_{net} = SP - (f+w)$

Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar (T_{net}) agar setara dengan beras, maka harus dikalikan dengan 1/3 (1 kg beras atau jagung ekuivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal nilai kalori), dengan perhitungan sebagai berikut:

$T_{net} = 1/3 * (C_{net} + SP_{net})$
--

Maka, Produksi Netto Pangan Serealialia (Padi, Jagung dan umbi-umbian) atau P_{food} :

$P_{food} = R_{net} + M_{net} + T_{net}$
--

Penghitungan Ketersediaan Pangan Sereal per Kapita per Hari

Gunakan data Total Populasi tengah tahun (t_{pop}) kabupaten pada tahun yang sama dengan data produksi pangan sereal. Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari (F) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam Gram.

Perhitungan produksi pangan tingkat kabupaten dilakukan dengan menggunakan data rata-rata produksi tiga tahunan (2005–2007) untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar karena sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari sereal dan umbi-umbian. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari tanaman sereal. Data rata-rata bersih dari komoditi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dihitung dengan menggunakan faktor konversi baku.

Konsumsi Normatif

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto pangan sereal per kapita per hari adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Konsumsi Normatif (C_{norm}) didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari sereal. Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari sereal. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari sereal dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal per hari.

Oleh sebab itu dalam analisis ini, kita memakai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam analisis ini dipilih penggunaan konsumsi normatif daripada penggunaan konsumsi aktual sehari-hari; karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya: daya beli, pasar dan infrastruktur jalan, kemampuan penyerapan sereal, kebiasaan/budaya, dll).

Rasio Ketersediaan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan/*Food consumption - availability ratio (IAV)*:

$$I_{AV} = \frac{F}{C_{normatif}}$$

dimana,

C_{norm} : Konsumsi Normatif (300 gram); dan

F : Ketersediaan Pangan Sereal.

Jika nilai ' I_{AV} ' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan sereal, atau kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih sereal (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia di daerah tersebut. Dan bila nilai ' I_{AV} ' kurang dari 1, maka ini menunjukkan kondisi defisit pangan sereal di daerah tersebut.

Lampiran 7. Form B2. Aspek Akses Pangan Tahunan

Kabupaten :

Tahun:

No	Kecamatan	Jml Keluarga	KK_Pra Sejahtera	KK_Sejahtera I	KK_Miskin (Total)	Persentase KK Miskin	Bobot
1	2	3	4	5	6 = (4 +5)	7 = (6/3) x 100%	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
	Jumlah	-	-	-	-	-	

Keterangan: Kolom 8

Persentase (r)

(%)

$r < 20$

$20 \leq r < 40$

≥ 40

Bobot

1

2

3

Warna

Hijau

Kuning

Merah

....., 2014

Sekretariat Pokja

Petugas

Lampiran 8. Form B3. Akses Pemanfaatan Pangan

Kabupaten :

Bulan : Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Balita	% Gizi Buruk	% Gizi Kurang	% KEP	Bobot KEP
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Jumlah		-	-	-	-	

Keterangan:

Persentase (r)

(%)

Bobot

Warna

r < 15	1	Hijau
15 ≤ r ≤ 20	2	Kuning
> 20	3	Merah